

Penebangan Mangrove Resahkan Warga Kubu Raya

Warga Desa Nipah Panjang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, mulai resah akibat laju intrusi yang melanda desa mereka. Selain Nipah Panjang, dua desa lainnya, masing-masing Teluk Nibung dan Harapan Jaya juga mengalami hal serupa. Air laut masuk ke permukiman dan menghantam persawahan serta perkebunan kelapa milik warga sejak dua tahun terakhir. Diduga kuat, intrusi terjadi akibat adanya aktivitas penebangan mangrove oleh PT Bina Ovivipari Semesta (Bios). Perusahaan ini mengantongi izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) dari Kementerian Kehutanan sejak 2006 lalu dan menguasai lahan konsesi seluas 10.100 hektare di Desa Tanjung Harapan.

Penelusuran *Jurnal Nasional*, Kamis (21/4), di lahan konsesi milik perusahaan yang berhasil meraih Sertifikat Pemanfaatan Hutan Lestari dari Departemen Kehutanan pada 2009 ini menunjukkan adanya bukaan lahan yang cukup menganga. Mereka juga membuka alur sungai buatan sebagai prasarana angkutan hasil tebangan. Namun warga setempat tidak dapat berbuat apa-apa lantaran kawasan itu masuk dalam perizinan yang mereka kantong. "Kami tidak dapat berbuat banyak. Aktivitas penebangan memang masuk di wilayah mereka. Menuntut ke sana sini pun hanya dapat janji. Setelah itu senyaplah semuanya tanpa ada hasil apa-apa," kata Simin (51), warga Nipah Panjang.

Simin menyebut, akibat air asin masuk ke wilayah permukiman, warga saat ini sudah kesulitan dapat air bersih. Dia juga dapat kabar, sawah milik warga di balik Gunung Bongkok, Desa Tanjung Harapan sudah tak dapat digunakan lagi. "Petani di sana sudah pindah mencari lahan yang aman. Sawah sudah terendam air laut. Pohon kelapa juga sudah banyak yang mati," katanya dengan nada kesal. Namun demikian, Kepala Urusan Bina Sosial PT Bios, Toto Subiakto menegaskan, bukan lantaran adanya penebangan mangrove di lahan konsesi PT Bios yang memicu terjadinya intrusi. "Sejak dulu juga air laut masuk. Dan 90 persen mata pencarian warga di sini adalah nelayan. Jadi bukan karena tebangan kami penyebabnya, sebab kita mengelola hutan secara lestari," katanya.

Pria 42 tahun ini menjelaskan, aturan pengelolaan hutan senantiasa dikedepankan. Misalnya, dalam hal rehabilitasi lahan, minimal dua tahun setelah penebangan baru dilakukan penanaman kembali. Sesuai aturan, kita wajib tanam 2.500 bibit per hektare. Kemudian jarak tebangan, minimal 20 meter dari bantaran sungai dan 500 meter dari garis laut. "Jenis kayu yang kita tebang hanya dua jenis, yakni tumbu dan mangrove. Kayu jenis lainnya tidak diambil. Kedua jenis kayu itu akan diolah menjadi *chip*, salah satu bahan baku pembuatan bubur kertas. Pabrik *chip* kami berlokasi di Batu Ampar. Kemudian limbah kayu juga diolah menjadi arang," kata Toto.

Dia menyebut lahan yang dikuasai perusahaan tempatnya mengabdikan dengan luas areal sekitar 10.100 hektare, secara administratif berada di wilayah Desa Tanjung Harapan. Sebagai kompensasi buat warga desa, PT Bios memberikan bantuan penyediaan air bersih di sekitar wilayah konsesi. Pembangunan infrastruktur sekolah dan bantuan sosial juga ada. Hal ini pula yang merisaukan Wahab (35), warga Desa Nipah Panjang. Dia balik menuding perusahaan tidak memperhitungkan imbas yang diterima desa lain di luar Tanjung Harapan akibat penebangan mangrove. "Ada desa lain yang terkena imbas penebangan itu. Kami yang ada di sini, di Desa Nipah Panjang dan Teluk Nibung," katanya. Wahab menegaskan, jika kebutuhan warga cuma air bersih, perusahaan pasti bisa penuhi. "Tapi itu *kan* kebutuhan jangka pendek. Bagaimana dengan jangka panjangnya? Setelah izin mereka selesai, apa yang ditinggalkan buat kami. Bencana? Jadi saya minta perusahaan itu segera ditutup demi kelangsungan hidup anak cucu kami di kemudian hari," katanya. **Andi Fachrizal**